

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian fiskal, APBD kabupaten Pesawaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan data dari tahun 2010 – 2013.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Adapun data yang diperoleh berupa :

- a. Data realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau total penerimaan daerah (TPD) Kabupaten, di mana di dalamnya terdapat data :
 1. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.
 2. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dan penerimaan lainnya berupa DAU dan DAK.
 3. Pinjaman pemerintah daerah.
 4. Belanja pemerintah daerah

Adapun sumber data berupa buku-buku laporan tahunan beberapa terbitan seperti Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesawaran dan jurnal-jurnal beberapa terbitan yang dapat diperoleh diberbagai instansi yaitu :

1. BPS Kabupaten Pesawaran
2. Dirjen Departemen Keuangan
3. Instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang berdasarkan atas satu variabel. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal-ordina-interval/rasio) Jenis teknik statistik yang digunakan harus sesuai dengan jenis data atau variabel berdasarkan skala pengukurannya (Hasan,2002;33).

1. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan daerah diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi menurut Halim (2001:127) adalah sebagai berikut :

1.1 Rasio kemandirian Keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Halim 2001:127).

Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = (\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} / (\text{Dana Perimbangan}))$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

Tabel 4. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam Nurhayani 2010

1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan) (Halim 2001:127). Dengan formulasi sebagai berikut :

Rasio Ketergantungan = (Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi)

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD Terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00% - 10,00%	Sangat Rendah
10,01% - 20,00%	Rendah
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Tinggi
>50,00%	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam Nurhayani 2010

1.3 Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (Halim 2001:127). Berikut formula untuk mengukur Desentralisasi Fiskal :

Rasio Desentralisasi Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total Penerimaan Daerah (TPD)

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 6 berikut :

Tabel 6. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase Total Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam Nurhayani 2010

1.4 Rasio Efisiensi

Pengukuran Tingkat Efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan (Halim 2001:127). Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Pengeluaran Belanja} / \text{Pendapatan})$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
Di bawah 60%	Sangat Efisiensi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam Nurhayani 2010

D. Gambaran Umum

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Daerah ini kaya akan sumberdaya alam pertanian, perkebunan dan kehutanan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesawaran)

1. Geografis

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak antara 104°0' sampai dengan 105°14' Bujur Timur dan 5°07' sampai dengan 5°48' Lintang Selatan. Secara umum memiliki iklim hujan tropis sebagaimana iklim Propinsi Lampung pada umumnya, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 mm sampai dengan 2.868 mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 hari/tahun.

Arus angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70 km/hari atau 5,83 km/jam. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 26 °C sampai dengan 29 °C dan suhu rata-ratanya adalah 28°C.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, maka wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung

Tengah;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Gadingrejo, dan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.

Dengan posisi geografis yang demikian, maka Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga Ibukota Provinsi Lampung. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km² atau 117.377 Ha dengan Kecamatan Padang Cermin sebagai kecamatan terluas, yaitu 31.763 Ha.

Dari luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran tersebut, 13.121 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 104.256 Ha merupakan lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah hutan negara.

Kabupaten Pesawaran terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) pulau. Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian. Kabupaten

Pesawaran juga mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Pesawaran di Kecamatan Padang Cermin dengan ketinggian 1.604 m. Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah, dengan panjang 54 km dan daerah aliran seluas 135,0 km².

Kabupaten Pesawaran merupakan daratan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Di Gedung Tataan sebagai pusat kota, misalnya, mempunyai tinggi 140,5 m dari permukaan laut.

Sumber: Selayang Pandang Pesawaran tahun 2010

2. Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sementara adalah 397.294 jiwa, yang terdiri atas 204.934 laki-laki dan 192.360 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 (SP2010) tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Pesawaran masih bertumpu di Kecamatan Padang Cermin yakni sebesar 22,16 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Gedong Tataan sebesar 21,57 persen. Kecamatan Punduh Pidada adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 25.919 jiwa. Sedangkan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Gedong Tataan merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya yakni masing-masing sebanyak 88.057 jiwa dan 85.696 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Pesawaran sekitar 1.173,77 km² yang didiami oleh 397.294 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pesawaran adalah sebanyak 338 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat

kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Gedong Tataan yakni sebanyak 882 jiwa/km² sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Punduh Pidada yakni sebanyak 115 jiwa/km².

Sex ratio penduduk Pesawaran adalah sebesar 106, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 6 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki.

Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Punduh Pidada yaitu sebesar 111. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesawaran per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,29 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Padang Cermin adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Pesawaran yakni sebesar 1,82 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Punduh Pidada yakni sebesar 0,74 persen.

Kecamatan Gedong Tataan menempati urutan kedua terbesar laju pertumbuhan penduduknya yaitu sebesar 1,78 persen meskipun kecamatan tersebut merupakan ibukota dari Kabupaten Pesawaran.

Sumber: Selayang Pandang Pesawaran tahun 2010